

Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kota Bitung

Oleh

¹ **Patries H. Kalangkahan**

² **W.A. Areros**

³ **Stefanus Sampe**

Abstract

Awareness of the importance of Community-Based Disaster Risk Reduction (PRBBK) should be pursued in view of the condition of Indonesia in general and Bitung in particular in geographically and geologically is a disaster-prone areas where mainstream disaster events from year to year showed a significant increase. PRBBK program requires the active involvement of communities across the stage of disaster risk reduction. Call for Proposals aims to reduce the vulnerability and increase the capacity of communities to prevent or minimize the potential loss and damage caused by the disaster to life, shelter, livelihoods and the environment. This study aims to assess the community participation in the program of community-based disaster risk reduction in Bitung, this study using research methods kualitatif.

Keywords: Participation, PRBBK, Bitung

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana telah merubah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dari konsep tanggap darurat yang bersifat responsif menjadi konsep pengurangan risiko bencana yang bersifat preventif. Penanggulangan bencana tidak hanya terpusat pada upaya tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana tetapi lebih diarahkan pada tahapan sebelum terjadinya (pra bencana) melalui upaya peningkatan kapasitas masyarakat terhadap bencana.

PRBBK di Kota Bitung di lakukan dengan membangun sinergisitas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung sebagai instansi

¹ Mahasiswa PSP Pascasarjana Unsrat

² Staf Pengajar di PSP Pascasarjana Unsrat

³ Staf Pengajar di PSP Pascasarjana Unsrat

penyelenggara penanggulangan bencana dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bitung. Bentuk sinergisitas ini diwujudkan dengan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang bertajuk Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Program ini dilaksanakan di Empat Kelurahan yaitu : Kelurahan Pampusung dan Kelurahan Paudean yang terletak di Kecamatan Lembeh Selatan, Kelurahan Mawali di Kecamatan Lembeh Utara, dan Kelurahan Batu Putih Atas di Kecamatan Ranowulu. Program ini merupakan *Pilot Project* Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) di Kota Bitung yang merupakan kolaborasi program Palang Merah Indonesia Bitung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung dengan *Redcross* Denmark sebagai penyantun dana.

Secara umum program PRBBK ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengenal potensi-potensi bencana yang ada disekitarnya, bagaimana masyarakat memetakan wilayah-wilayah yang rawan bencana di lingkungannya, serta bagaimana tindakan preventif yang harus dilakukan masyarakat sebagai tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Program PRBBK ini dilaksanakan dengan dasar pemahaman bahwa masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana adalah yang paling pertama berhadapan dengan bencana yang apabila tidak dibekali dengan informasi dan pengetahuan tentang bencana maka akan memiliki tingkat kerentanan yang besar dan ketahanan masyarakat terhadap bencana akan sangat rendah.

Observasi awal di empat kelurahan menunjukkan adanya resistensi masyarakat terhadap program PRBBK dimana perekrutan anggota masyarakat untuk menjadi anggota komunitas siaga bencana kurang mendapat tanggapan yang baik. Partisipasi masyarakat untuk hadir dalam pertemuan awal tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam rencana. Salah satu alasan yang dikemukakan masyarakat bahwa ketidakhadiran mereka dalam rapat karena mereka sedang bekerja pada saat pertemuan dilaksanakan sehingga kalau pekerjaan ditinggalkan maka mereka akan kehilangan penghasilan. Alasan lainnya ada masyarakat yang menganggap bahwa bencana adalah otoritas Sang Pencipta jadi kalau Tuhan sudah berkehendak maka manusia tidak dapat menolaknya. Kondisi ini

membutuhkan upaya ekstra fasilitator dalam kerjasama dengan pemerintah kelurahan untuk meyakinkan masyarakat tentang arti pentingnya program PRBBK melalui upaya pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PRBBK ini. Dengan demikian terjadi pergeseran waktu dalam *schedule* proses perekrutan anggota komunitas siaga bencana.

Berlatar belakang pokok pikiran tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji tentang partisipasi masyarakat di Kelurahan Papusungan, Paudeaan, Mawali dan Batu Putih Atas dalam Program PRBBK. Dalam penelitian ini dianalisis bagaimana partisipasi masyarakat mulai dari tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai dengan evaluasi kegiatan dalam program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Menurut Neswtrom (2004) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dari orang dalam situasi kelompok dimana mereka berkontribusi pada tujuan kelompok dan juga berbagai tanggung jawab dalam mencapai tujuan.

Menurut Isbandi (2007:27) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen dalam Firmansyah (2009) menyebutkan pengertian partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

- b. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau sekelompok orang yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang penting dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan terlebih jika dikaitkan dengan paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang akan dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.

Agus Friady Saputra Zalukhu (2013) yang mengutip pendapat Conyer menyebutkan tiga arti penting partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proye-proyek akan gagal.
- b. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam program pembangunan baik dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan maka akan lebih meningkatkan kepercayaan mereka terhadap program yang ada.
- c. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri.

Menurut Siahaan (www.repository.unhas.id) partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sebagai berikut :

- a. Dari pandangan sosial keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini secara simultan mempromosikan semangat komunitas dalam rasa kerjasama dan keterlibatan.
- b. Dari pandangan secara politik partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (*counsellors*) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.
- c. Dari segi *planning*, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest* dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.
- d. Kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku *they/we* menjadi perilaku *us*.

B. Konsep Bencana

1. Pengertian Bencana

Undang-undang No. 24 tahun 2007 memberikan batasan tentang bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sudewo (2006) mengatakan bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2. Jenis Bencana

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengelompokkan bencana kedalam tiga kategori yaitu :

a. Bencana alam.

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

1. Gempa bumi.

Menurut direktorat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, lempeng samudera yang rapat massanya lebih besar, ketika bertumbukkan dengan lempeng benua di zona tumbukan (subduksi) akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung bumi. Perlambatan gerak itu menyebabkan penumpukan energy di zona subduksi dan zona patahan, akibatnya d zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran. Saat batas elastisitas lempeng terlampaui maka terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energy secara tiba-tiba. Proses ini menimbulkan getaran partikel ke segala arah yang disebut telombang gempa bumi.

2. Tsunami.

Tsunami ialah gelombang laut yang terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dan dapat diakibatkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor. Tsunami juga bisa ditimbulkan oleh kegiatan gunung berapi dibawah permukaan laut. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Gempa bumi, pergerakan besar di dasar maupun permukaan laut, letusan gunung berapi,

dan berbagai macam letusan bawah laut dapat menyebabkan tsunami. Tsunami dapat terjadi jika ada pergeseran vertical pada pertemuan dua lempengan bumi.

3. Banjir.

Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya. Penyebab bencana banjir antara lain :

- 1) Curah hujan tinggi
- 2) Pemukiman tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut.
- 3) Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit.
- 4) Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai
- 5) Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai.
- 6) Kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai.

2. Bencana Non Alam

Bencana Non Alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang atara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit. Wabah atau epidemic ialah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia di dalam ruang lingkup yang besar, misalnya antar negara atau seluruh dunia. Contoh wabah terburuk yang memakan korban jiwa jumlah besar ialah pandemi flu, cacar dan tuberkulosis.

3. Bencana Sosial

Bencana Sosial ialah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. **Konflik Sosial atau kerusuhan sosial** atau huru hara merupakan suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).

Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

C. Konsep Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

1. Pengertian PRBBK

Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR,2009) Pengurangan Risiko Bencana adalah konsep dan praktik mengurangi risiko-risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya, kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 menyebutkan bahwa Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Haghebaert dalam *United Nations Development Programme and Government of Indonesia* (2012) mengatakan Pengurangan Risiko Bencana

Berbasis Komunitas merupakan suatu proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko untuk mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanannya dan meningkatkan kapasitasnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Papusungan, Kelurahan Paudean, Kelurahan Mawali, Kelurahan Batu Putih Atas.

Adapun Penelitian ini difokuskan terhadap partisipasi masyarakat dalam program PRBBK di Kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu Putih Atas melalui empat tahapan, yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan
3. Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan,
4. Partisipasi Masyarakat dalam evaluasi program PRBBK

PEMBAHASAN

Kajian partisipasi masyarakat dalam program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di empat kelurahan di Kota Bitung yaitu Kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu Putih Atas didasari pada teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphof.

1. Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan (*Participation in decision making*)

Pada prinsipnya keberhasilan program pembangunan tergantung pada keterlibatan atau partisipasi masyarakat dan sebaliknya pembangunan dapat merangsang partisipasi masyarakat. Wood (dalam Supriatna, 1985 : 37) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menyangkut pemberian saran yang bertujuan menerima atau menolak program yang akan dilaksanakan. Jadi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah suatu proses dalam memilih alternative yang didasarkan pada

pertimbangan yang menyeluruh sehingga diperoleh rencan, strategi dan kebijakan utnuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan informan Lurah di empat kelurahan yaitu Kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu Putih atas tergambar bahwa proses pengambilan keputusan dimulai dengan rapat fasilitator dengan pihak BPBD Kota Bitung, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan PMI Kota Bitung untuk mendengarkan pemaparan Pihak PMI tentang program PRBBK yang diusulkan akan dilaksanakan di empat kelurahan di Kota Bitung yakni kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu Putih Atas. Rapat ini selain mendengarkan pemaparan pihak PMI juga mendengarkan tanggapan pihak terkait dalam hal ini BPBD Kota Bitung dan pemerintah kecamatan dan kelurahan yang pada kesimpulannya menerima ide/gagasan program PRBBK untuk dilaksanakan di empat kelurahan. Selanjutnya di tingkat kelurahan proses pengambilan keputusan di lakukan rapat antara fasilitator PMI dengan Lurah dan kepala lingkungan dan ketua RT yang ada dimasing-masing kelurahan guna membahas proses perekrutan anggota SIBAT yang harus mengikuti prasyarat dari panduan teknis kegiatan yang ditetapkan oleh *Red Cross Denmark* dan PMI Kota Bitung. Rapat ini memutuskan bahwa untuk merekrut anggota SIBAT diberikan tanggungjawab salah satu kepala lingkungan untuk menjadi koordinator kelompok SIBAT yang akan dibentuk.

Wawancara dengan informan kepala lingkungan di empat kelurahan selaku koordinator kelompok SIBAT proses perekrutan anggota kelompok SIBAT menjadi kewenangan koordinator kelompok SIBAT dalam hal ini kepala lingkungan dimana berlangsungnya proses perekrutan ini kepala lingkungan mengedarkan undangan serta mendatangi secara langsung rumah warga yang menurut pengamatannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam panduan teknis kegiatan yang ada. Selanjutnya ada informan yang mengatakan bahwa mereka mengetahui ada kegiatan pelatihan SIBAT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dilihat dari proses pengambilan keputusan dapat dilihat bahwa masyarakat tidak dilibatkan secara langsung tetapi hanya aparat pemerintah kota, kecamatan

serta kelurahan yaitu lurah, kepala lingkungan dan RT yang melakukan pembahasan tentang program PRBBK yang akan dilaksanakan. Masyarakat dan tokoh masyarakat berada pada posisi melaksanakan keputusan yang telah disepakati oleh PMI dan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Masyarakat lebih diarahkan partisipasinya dalam pelaksanaan program yaitu pelatihan SIBAT. Dalam hal ini proses pengambilan keputusan belum optimal karena masyarakat hanya mendapat kesempatan menyetujui atau “terlebih dahulu diarahkan” untuk menyetujui dan melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan (*Participation in Implementation*)

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini menurut Cohen dan Uphoff (1977 : 68,69) dapat berupa :

- a. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran,
- b. Partisipasi dalam bentuk sumbangan materi ; bahan maupun uang,
- c. Partisipasi dalam bentuk tenaga,
- d. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat (kelompok SIBAT) di kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan batu Putih Atas dalam program PRBBK ini merupakan partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal mereka mengikuti pelatihan dan keterlibatan aktif dalam kelompok SIBAT dalam mengadakan survey lokasi rawan bencana, pembuatan peta rawan bencana dan peta evakuasi, serta penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di tingkat kelurahan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PRBBK masyarakat khususnya anggota kelompok SIBAT menunjukkan partisipasi yang aktif dalam mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir hanya di kelurahan Batu Putih Atas yang sempat beberapa kali terjadi pergantian anggota SIBAT dikarenakan ada yang mengundurkan diri karena harus mengikuti ujian di kampus. Kendala yang ada pada tahapan perekrutan yang menyebabkan bergesernya schedule kegiatan yang direncanakan.

Melihat kendala – kendala yang ada tahap awal pelaksanaan yaitu dalam proses perekrutan anggota SIBAT disebabkan karena masyarakat tidak

mendapatkan sosialisasi yang cukup dari pemerintah kelurahan dimana mereka hanya mendapat penjelasan yang singkat sewaktu kepala lingkungan mendatangi rumah mereka ataupun menyampaikan undangan untuk menjadi anggota kelompok SIBAT. Dalam hal ini sosialisasi awal program harus menjadi hal yang penting. Sebagaimana Koentjaraningrat (1997 : 29) mengungkapkan bahwa penting untuk dilakukan cara-cara yang efektif yakni dengan menyampaikan tujuan program sehingga masyarakat mengetahui bahwa program tersebut nantinya akan berguna bagi mereka, maka besar kemungkinan masyarakat akan berpartisipasi. Partisipasi yang dilandaskan pada pengetahuan dan kegunaan program bagi diri individu biasanya akan menghasilkan partisipasi yang spontan sifatnya.

Kendala pada tahapan awal proses perekrutan berbeda dengan ketika program pelatihan SIBAT dilaksanakan dimana sebagian besar anggota kelompok SIBAT menunjukkan partisipasi yang baik dalam pelaksanaan pelatihan baik pada saat pemaparan materi dan praktik lapangan survey daerah rawan bencana, pemetaan daerah rawan bencana dan evakuasi, penyusunan RPB serta pelaksanaan drill yang menunjukkan partisipasi yang baik oleh kelompok SIBAT dan anggota masyarakat yang tidak mengikuti pelatihan.

3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan (*Participation in Benefits*)

Cohen dan Uphoff (1977 : 60) menyatakan bahwa partisipasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan dapat dibedakan menjadi :

- 1) Manfaat material, seperti peningkatan pendapatan atau aset lain yang penting bagi kepentingan pribadi.
- 2) Manfaat sosial, pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa lain
- 3) Manfaat individual, seperti pengembangan diri, kekuasaan politik, dan kepercayaan umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan kuasanya
- 4) Konsekuensi yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan baik lurah, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, program edukasi ini telah memberikan manfaat guna memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat kelurahan. Selain itu masyarakat juga menikmati manfaat material

dimana dari program ini tersedia peralatan untuk peringatan dini kebencanaan seperti Toa, Handy Talkie (HT), dan peralatan Genset yang dapat dimanfaatkan warga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pihak pemerintah kelurahan tetap memberikan arahan untuk melanjutkan program secara mandiri oleh kelompok SIBAT dengan tetap mengadakan pertemuan, diskusi kelompok tentang kebencanaan. Informan anggota SIBAT juga menyatakan bahwa mereka masih melakukan pertemuan walaupun program PRBBK oleh PMI Kota Bitung telah berakhir, mereka melakukan *follow up* dengan melakukan pertemuan dan diskusi bahkan mereka tetap siaga sewaktu-waktu bila diperlukan menjadi relawan bencana di Kota Bitung bila terjadi kejadian bencana.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat khususnya anggota kelompok SIBAT cukup baik dalam tahap pemanfaatan program PRBBK.

4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi (*Participation in Evaluation*)

Pengawasan masyarakat dalam program pembangunan baik fisik maupun non fisik perlu dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut Kartasasmita (1997) tanpa pengawasan dan pengendalian maka apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat menuju pada arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi adalah berupa memberikan informasi, kritik, maupun laporan untuk membantu para pelaku program agar mengetahui kemajuan dan perkembangan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, serta mengetahui hasil akhir yang dicapai apakah semuanya sudah sesuai dengan target dan pedoman PRBBK. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa evaluasi program PRBBK ini telah dilakukan oleh kelompok SIBAT yang merupakan representasi masyarakat kelurahan pada saat mereka melakukan kegiatan tahapan survey lokasi, pemetaan daerah rawan bencana dan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kelurahan. Kelompok SIBAT di masing-masing kelurahan yang pada pelaksanaan praktik lapangan dibagi menjadi 2 kelompok kecil selalu melakukan diskusi dan mengevaluasi hasil

yang mereka dapat di lapangan. Evaluasi juga dilakukan oleh fasilitator PMI selama kegiatan berlangsung serta evaluasi atas laporan program dari masing-masing kelompok SIBAT.

Dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi program PRBBK di kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu Putih Atas baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kota Bitung masih perlu di tingkatkan. Hal ini dilihat dari tahapan sebagai berikut:

1. Pada tahapan pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat Kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu Putih Atas minim. Hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan hanya diwakilkan pada aparat pemerintah kelurahan yakni lurah, kepala lingkungan, ketua RT yang melakukan rapat/pertemuan untuk membahas program dengan pihak PMI. Masyarakat diposisikan sebagai penerima keputusan dan “diarahkan” untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan dan telah ada panduan teknis yang harus diikuti, baik menyangkut syarat-syarat yang diperlukan untuk perekrutan anggota kelompok SIBAT.
2. Pada tahapan pelaksanaan program PRBBK, partisipasi masyarakat Kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu Putih Atas terlihat belum maksimal. Hal terlihat pada proses awal perekrutan yang prasyarat keanggotaan kelompok SIBAT mengacu pada panduan teknis dan hanya dilakukan oleh kepala lingkungan yang dipercayakan sebagai koordinator kelompok SIBAT yang bertugas untuk mendatangi rumah warga ataupun memberikan undangan guna memastikan kesiapan masyarakat untuk menjadi anggota SIBAT. Kurangnya sosialisasi menjadi penyebab berubahnya schedule perekrutan anggota SIBAT. Partisipasi aktif di tunjukkan oleh kelompok SIBAT pada saat pelaksanaan pelatihan dan drill.

3. Pada tahapan pemanfaatan program PRBBK di kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu PUIh Atas, partisipasi masyarakat sudah baik, dimana walaupun program telah berakhir tetapi mereka terus melakukan pertemuan/rapat yang membicarakan walaupun tidak seintens pada saat program masih berlangsung. Anggota SIBAT memiliki komitmen untuk tetap memelihara hasil yang mereka dapatkan dalam pelatihan. Sosialisasi ke sekolah-sekolah dilakukan guna memberikan pemahaman dini kepada anak-anak tentang bencana sekaligus juga merefresh kembali pengetahuan yang mereka dapatkan dalam pelatihan.
4. Pada evaluasi program PRBBK di Kelurahan Papusungan, Paudean, Mawali dan Batu Putih Atas, partisipasi masyarakat yang direpresentasikan oleh kelompok SIBAT sudah baik dimana evaluasi telah dilakukan selama proses pelatihan berlangsung.

B. Saran

Sosialisasi program harus sampai kepada masyarakat bawah dan tidak hanya pada aparat pemerintah kelurahan sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dari program PRBBK

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Edisi ke-2 Rajawali Pers, Jakarta
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2013, *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2016, *Data Informasi Bencana Indonesia*
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta
- Dwiningrum, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Firmansyah, 2009, *Partisipasi Masyarakat*, <https://sacafirmansyah.wordpress.com>

<https://m.tempo.co/read.news/2004> *Gempa Nabire*

<https://id.wikipedia.org/2014> *Bencana Banjir Bandang Manado*

<https://id.m.wikipedia.org/2008> *Banjir*

Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*, PT. Gramedia,
Jakarta

United Nations Development Programme and Government of Indonesia, 2012,
*Making Aceh Safer Through Disaster Risk reduction, Panduan
Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas*

